

**Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama**

DOI: 10.56013/jpm.v12i2.5110

**State-Crime Nexus di Perbatasan Myanmar: Simbiosis Ekonomi Politik Junta Militer dan Border Guard Forces dalam Ekosistem Yatai New City****Dita Amanda Prasty<sup>1</sup>, Honest Dody Molasy<sup>2</sup>, Agung Purwanto<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Jember, Indonesia**Submission:**

25/10/2025

**Revised:** 5/11/2025**Accepted:** 20/11/2025**Abstrak**

Kudeta militer Myanmar tahun 2021 memicu runtuhnya tata kelola negara yang sering diasumsikan sebagai penyebab utama maraknya kejahatan terorganisir. Namun, ekspansi pesat kawasan Yatai New City di Myawaddy menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Penelitian ini menginvestigasi ekonomi politik Yatai New City, khususnya interaksi antara investor asing, Karen Border Guard Forces (BGF), dan Junta Militer. Menggunakan kerangka State–Crime Nexus dan pendekatan kualitatif berbasis triangulasi sumber, penelitian ini menantang narasi ungoverned space. Temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan industri penipuan siber (*cyber scam*) di Yatai bukan sekadar gejala ketidakhadiran negara, melainkan hasil dari ekosistem yang simbiotik. Dalam tatanan ini, BGF menyediakan keamanan dan infrastruktur logistik, investor asing menyuplai modal dan teknologi, sementara Junta memberikan impunitas struktural sebagai imbalan atas loyalitas politik dan pertahanan ekonomi di tengah sanksi internasional. Studi ini menyimpulkan bahwa formasi "scam state" di Myanmar merupakan adaptasi strategis kekuasaan otoriter, yang mengimplikasikan bahwa intervensi internasional harus menargetkan aliansi politik-ekonomi yang menopang operasi tersebut, bukan hanya melihatnya sebagai isu penegakan hukum semata.

**Kata Kunci :** Border Guard Forces; Ekonomi Politik Kejahatan; Kejahatan Siber; Kejahatan Transnasional; Myanmar; State–Crime Nexus; Yatai New City

**Email**

coresponding author:

[ditaprasty59@gmail.com](mailto:ditaprasty59@gmail.com)**Abstract**

The 2021 military coup in Myanmar precipitated a collapse in state governance, creating a vacuum often assumed to be the primary driver of organized crime. However, the rapid expansion of Yatai New City in Myawaddy suggests a more complex dynamic. This study investigates the political economy of the Yatai New City, specifically the interaction between foreign investors, the Karen Border Guard Forces (BGF), and the Military Junta. Employing the State–Crime Nexus framework and a qualitative approach based on source triangulation, this research challenges the "ungoverned space" narrative. The findings reveal that the persistence of the cyber-fraud industry in Yatai is not a symptom of state absence but the result of a symbiotic ecosystem. In this arrangement, the BGF provides security and logistical infrastructure, foreign investors supply capital and technology, and the Junta grants structural impunity in exchange for political loyalty and economic survival amidst international sanctions. This study concludes that the "scam state" formation in Myanmar represents a strategic adaptation of authoritarian power, implying that international interventions must target the political-economic alliances sustaining these operations rather than treating them solely as law enforcement issues.

**Keywords:** Border Guard Forces; Political Economy of Crime; Cybercrime; Transnational Crime; Myanmar; State Crime Nexus; Yatai New City

## PENDAHULUAN

Kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 telah memicu presipitasi keruntuhan tata kelola negara yang secara fundamental mengubah lanskap keamanan regional. Peristiwa politik ini tidak hanya menciptakan krisis legitimasi bagi Junta Militer, tetapi juga membuka ruang vakum yang segera diisi oleh pertumbuhan ekonomi kriminal yang beroperasi lintas batas negara. Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan serta lemahnya kapasitas negara dalam melakukan penetrasi kontrol ke wilayah periferi telah menciptakan kondisi ideal bagi ekspansi kejahatan terorganisir. Laporan terbaru dari Organized Crime Index secara eksplisit menempatkan Myanmar sebagai salah satu episentrum aktivitas kriminal terbesar di dunia saat ini. Negara ini menjadi sarang bagi berbagai aktivitas ilegal, mulai dari perdagangan manusia, perjudian ilegal, hingga kejahatan siber yang menyasar korban global (*The Organized Crime Index*, 2023:17). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kekacauan pasca-kudeta bukan sekadar isu politik domestik, melainkan pemicu utama bagi menjamurnya industri kejahatan transnasional yang terstruktur.

Secara spesifik, dinamika kriminalitas ini terkonsentrasi di wilayah perbatasan yang memiliki sejarah konflik etnis panjang, terutama di kawasan Myawaddy yang berbatasan langsung dengan Thailand. Wilayah ini telah bertransformasi menjadi zona abu-abu di mana hukum negara tidak lagi berlaku secara efektif, digantikan oleh aturan main yang ditetapkan oleh aktor-aktor bersenjata non-negara. Dalam studi mengenai perbatasan Kolombia–Venezuela, ditemukan bahwa organisasi kriminal tidak hanya mengeksplorasi ketidakstabilan perbatasan secara oportunistik, tetapi secara aktif mengambil peran dalam praktik pengelolaan sosial-spasial dan ekonomi ilegal di wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa konflik perbatasan dapat *mengakselerasi* pertumbuhan ekonomi bayangan dan tatanan kriminal transnasional di kawasan konflik (Pinzón & Mantilla, 2020). Kondisi geografis yang sulit dijangkau dan kedekatan dengan akses perbankan serta internet dari negara tetangga menjadikan Myawaddy lokasi strategis bagi operasi kriminal. Oleh karena itu, dinamika kriminalitas di Myanmar tidak dapat dipisahkan dari struktur politik dan konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Salah satu manifestasi paling mencolok dari fenomena ini adalah transformasi radikal proyek Yatai New City di wilayah Shwe Kokko. Pada awalnya, kawasan ini dipromosikan secara agresif sebagai proyek "kota pintar" yang akan menjadi pusat teknologi dan perdagangan di Asia Tenggara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pergeseran fungsi yang drastis menjadi pusat operasi penipuan daring (online scam) dan aktivitas kriminal digital berskala global. Penelitian terdahulu mengungkap bahwa proyek ini beroperasi melalui jaringan kompleks yang melibatkan investor asing dan aktor bersenjata lokal yang memiliki otonomi tinggi. Aktor kunci dalam ekosistem ini adalah Karen Border Guard Forces (BGF), yang secara cerdik memanfaatkan kekosongan otoritas pusat untuk mengembangkan portofolio ekonomi ilegal mereka (United States Institute of Peace, 2022). Transformasi Yatai New City menjadi bukti nyata kegagalan tata kelola pembangunan di wilayah konflik.

Peran milisi pro-pemerintah seperti BGF menjadi sangat krusial dalam memahami keberlanjutan operasi ilegal di kawasan tersebut. Berbeda dengan kelompok pemberontak yang melawan negara, BGF beroperasi di bawah payung formal angkatan bersenjata namun menikmati impunitas dalam menjalankan bisnis ilegalnya. USIP mengidentifikasi fenomena ini sebagai kemunculan aktor hibrida yang menggabungkan kekuatan militer dengan motif korporasi kriminal. Temuan-temuan awal tersebut secara kuat mengindikasikan bahwa kehadiran milisi yang berafiliasi dengan negara merupakan variabel independen utama yang memungkinkan berfungsinya ruang-ruang kriminal di perbatasan. Tanpa proteksi dari aktor bersenjata ini, operasi skala besar seperti di Yatai New City mustahil dapat bertahan.

Meskipun fenomena ini sangat mendesak, studi mengenai Myanmar pasca-kudeta sejauh ini masih didominasi oleh analisis konvensional. Mayoritas literatur yang ada lebih banyak menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia, represi politik junta, serta dinamika pertempuran antara militer dengan kelompok perlawanan pro-demokrasi. Akibatnya, terdapat research gap yang signifikan terkait bagaimana struktur ekonomi politik pasca-kudeta secara spesifik memfasilitasi tumbuhnya industri kriminal digital. Belum banyak penelitian yang membedah secara mendalam hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara aktor negara, milisi pro-pemerintah, dan jaringan kriminal transnasional. Minimnya kajian mengenai aspek simbiosis ini menjadi dasar urgensi dilakukannya penelitian ini untuk melengkapi literatur yang ada.

Untuk membedah kompleksitas tersebut, artikel ini mengadopsi kerangka konseptual State-Crime Nexus sebagai landasan teoritis utama. Kerangka ini menawarkan perspektif alternatif yang menolak pandangan biner bahwa kejahatan terorganisir selalu beroperasi dalam posisi yang berlawanan dengan negara. Sebaliknya, teori ini menekankan bahwa dalam konteks negara lemah atau terfragmentasi, aparat negara sering kali bertransformasi menjadi fasilitator atau bahkan bagian integral dari ekonomi kriminal itu sendiri. Andreas (2013: 12) menjelaskan bahwa teori tersebut menyoroti peran aktif aktor negara dalam memfasilitasi kejahatan terorganisir demi kepentingan strategis pertahanan kekuasaan. Dalam analisisnya yang mendalam mengenai hubungan negara dan kejahatan, Andreas menekankan: In weak or fractured states, the boundary between state authority and criminal enterprise becomes porous, allowing state actors not only to tolerate but to actively enable illicit economies for political survival. (Andreas, 2013: 19)

Dalam konteks teoritis yang lebih luas, State-Crime Nexus membantu memetakan terbentuknya apa yang disebut sebagai “zona abu-abu kekuasaan”. Ini adalah wilayah yang secara formal yuridis berada di bawah kedaulatan negara, namun secara de facto dikendalikan oleh aktor non-negara yang memonopoli kekerasan dan sumber daya ekonomi (Andreas, 2013: 22). Investigasi terbaru bahkan memperlihatkan dukungan teknis yang canggih dari milisi, seperti penyediaan internet satelit yang dilindungi untuk menghindari deteksi intelijen asing (Burgess, 2025). Fakta ini diperkuat oleh argumen Snyder (2006: 38) bahwa kelompok bersenjata di negara konflik sering mengubah kekerasan menjadi tatanan politik yang menghasilkan pendapatan. Shelley (2018: 41–42)

---

turut menegaskan bahwa ketika institusi negara melemah, pejabat negara semakin bergantung pada jaringan ilegal untuk mempertahankan otoritasnya, sehingga mengaburkan batas antara legalitas dan kriminalitas.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan segitiga antara investor asing, Border Guard Forces, dan Junta Militer dalam membentuk ekosistem kejahatan di Yatai New City. Topik ini memiliki relevansi vital tidak hanya bagi pemahaman keamanan regional Asia Tenggara, tetapi juga sebagai kontribusi teoritis untuk memperluas kajian State-Crime Nexus di zona konflik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme simbiosis mutualisme antara aktor negara dan non-negara yang menjamin keberlanjutan operasi kriminal tersebut. Lebih jauh, penelitian ini akan menguraikan implikasi serius dari aliansi ekonomi-politik ini bagi masa depan tata kelola negara Myanmar pasca-kudeta. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan perspektif baru dalam merumuskan kebijakan penanganan kejahatan transnasional yang lebih efektif.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelusuri fenomena kontemporer yang mendalam dan terikat konteks, yaitu dinamika ekonomi politik di Yatai New City pasca-kudeta. Kompleksitas hubungan antara aktor negara (Junta Militer) dan aktor non-negara (BGF dan investor asing) dalam ekosistem "zona abu-abu" menuntut analisis yang sensitif terhadap nuansa politik yang tidak dapat dikuantifikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Yin (2018), studi kasus relevan digunakan ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas, yang sangat sesuai dengan kondisi tumpang tindih antara otoritas negara dan operasi kriminal di perbatasan Myanmar. Peneliti dalam hal ini bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) yang berfungsi menginterpretasikan data, memilah informasi dari berbagai sumber yang terfragmentasi, serta merekonstruksi makna di balik keputusan strategis para aktor yang terlibat.

Jenis dan Sumber Data Untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi (documentary research). Sumber data dikategorikan ke dalam tiga klaster utama untuk meminimalisir bias:

1. Laporan Resmi Institusi: Meliputi laporan investigasi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United States Institute of Peace (USIP), dan dokumen sanksi dari U.S. Department of the Treasury.
2. Literatur Akademik dan Jurnal: Artikel jurnal bereputasi yang membahas State-Crime Nexus, studi perbatasan Asia Tenggara, dan ekonomi politik konflik.
3. Laporan Investigasi Media dan Think-Tank: Termasuk laporan mendalam dari Frontier Myanmar, Reuters, Crisis Group, dan citra satelit yang dipublikasikan oleh lembaga pemantau konflik untuk

memverifikasi ekspansi fisik infrastruktur di Shwe Kokko. Batasan waktu pengambilan data difokuskan pada periode 2021 hingga 2025, untuk menangkap dinamika spesifik setelah kudeta militer terjadi.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur berbasis digital dengan menggunakan kata kunci spesifik (search strings) seperti: "Myanmar Border Guard Forces", "Yatai New City Scam Operations", "Post-Coup Political Economy", dan "State-Crime Nexus in Southeast Asia". Proses ini menjamin aspek reproducibility bagi peneliti lain yang ingin melacak jejak data yang sama. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria kredibilitas penerbit dan relevansi substansial terhadap rumusan masalah mengenai simbiosis mutualisme antara BGF dan Junta.

Teknik Analisis Data Data dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

1. Kondensasi Data (Data Condensation): Peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah dari berbagai laporan menjadi unit-unit informasi yang relevan dengan peran BGF, kepentingan Junta, dan aliran modal investor.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah dikondensasi disusun dalam bentuk narasi logis dan matriks hubungan antar-aktor untuk memetakan pola aliansi strategis.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification): Peneliti menarik makna dari pola yang ditemukan dengan merefleksikannya kembali pada kerangka teori State-Crime Nexus.

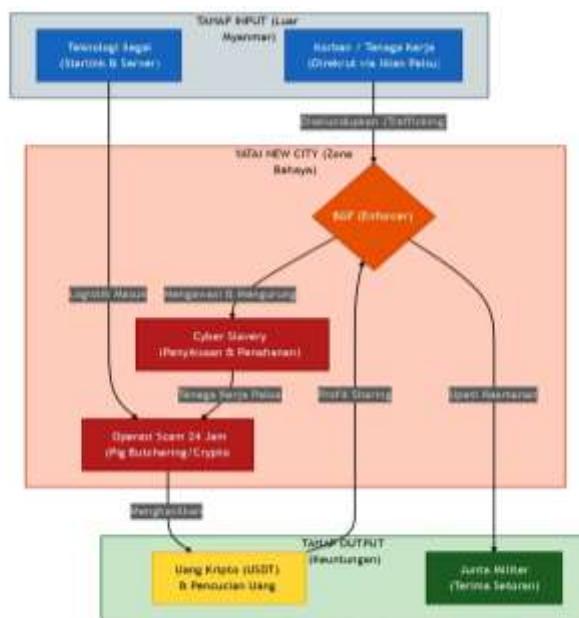
Keabsahan Data Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber (source triangulation). Sebagaimana didefinisikan oleh Denzin (2009), teknik ini melibatkan pengujian konsistensi informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, klaim yang dibuat oleh media mengenai keterlibatan militer akan dikroscek dengan laporan satelit dan dokumen kebijakan resmi atau laporan NGO internasional. Jika ditemukan perbedaan data, peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami konteks politik di balik perbedaan narasi tersebut, sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan komprehensif.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Ekosistem Kriminal Hibrida: Transformasi Yatai New City dan Komodifikasi Keamanan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Yatai New City telah berevolusi jauh melampaui rencana awalnya sebagai proyek properti komersial semata, kini beroperasi sebagai entitas "hibrida" yang menggabungkan infrastruktur korporasi modern dengan tata kelola militeristik. Transformasi ini didorong oleh lonjakan operasi kejahatan siber yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah

tersebut, sebagaimana dicatat oleh Thuzar dan Sin (2024) yang menyebut fenomena ini sebagai kebangkitan luar biasa dari operasi kriminal pasca-kudeta. Aktor sentral yang memungkinkan terciptanya ekosistem ini adalah Karen Border Guard Forces (BGF), sebuah milisi etnis yang berafiliasi dengan militer Myanmar namun memiliki otonomi bisnis yang luas. Dalam konteks Yatai New City, BGF tidak lagi sekadar bertindak sebagai unit keamanan konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi penyedia jasa infrastruktur (*infrastructure provider*) bagi sindikat kriminal transnasional. Tanpa fasilitasi aktif dari BGF, mustahil bagi investor asing untuk menanamkan modal besar di wilayah yang secara geopolitik sangat tidak stabil tersebut.



Gambar 1. Rantai ekosistem kejahatan di Yatai New City

Hal ini dapat dipahami secara lebih detail melalui pemetaan alur operasional Yatai New City yang memperlihatkan keterkaitan antara tahap input, proses, dan output kejahatan. Pada tahap input, ekosistem kriminal Yatai bergantung pada dua komponen utama yang berasal dari luar Myanmar, yakni teknologi ilegal berupa akses internet satelit dan infrastruktur server, serta pasokan tenaga kerja yang direkrut melalui iklan kerja palsu dan kemudian diselundupkan lintas batas. Kedua elemen ini masuk ke dalam wilayah Yatai melalui jaringan penyelundupan yang terorganisir, menandai keterkaitan erat antara kejahatan siber dan perdagangan manusia. Setelah memasuki zona Yatai, Border Guard Forces (BGF) berperan sebagai aktor pengendali utama yang mengawasi, mengatur, dan menegakkan disiplin operasional melalui kekerasan dan penahanan paksa terhadap tenaga kerja. Dalam fase proses, tenaga kerja dipaksa menjalankan operasi penipuan daring, sementara BGF memastikan keamanan, logistik, serta kelangsungan operasional melalui kontrol territorial dan militeristik. Tahap output dari sistem ini menghasilkan aliran keuntungan dalam bentuk aset kripto dan pencucian uang, yang kemudian dibagi melalui mekanisme profit sharing antara

---

operator kriminal dan aktor bersenjata lokal, serta setoran keamanan kepada elit militer. Alur ini menegaskan bahwa Yatai New City berfungsi sebagai sistem produksi kejahatan digital yang terstruktur, di mana kekerasan, teknologi, dan ekonomi ilegal terintegrasi dalam satu rantai nilai yang stabil dan berkelanjutan.

Salah satu peran fundamental BGF dalam ekosistem ini adalah penyediaan infrastruktur teknologi yang canggih untuk menunjang operasi penipuan global. BGF memfasilitasi terciptanya "zona aman" dengan menyediakan akses internet satelit berkecepatan tinggi dan pasokan listrik stabil yang merupakan komponen vital bagi industri scam. United Nations Office on Drugs and Crime (2024) menyoroti bahwa konvergensi antara penipuan siber, perbankan bawah tanah, dan inovasi teknologi telah menciptakan lanskap ancaman baru di Asia Tenggara. Di Yatai, konvergensi ini terwujud dalam bentuk fasilitas server yang dilindungi secara militer dari sabotase maupun pemantauan eksternal. Dukungan teknis ini membuktikan bahwa aliansi antara milisi dan kriminal bukan hanya bersifat taktis di lapangan, tetapi juga strategis dalam ranah digital. Hal ini menciptakan paradoks di mana wilayah konflik justru memiliki konektivitas digital yang lebih unggul dibandingkan wilayah sipil lainnya.

Namun, di balik kecanggihan infrastruktur digital tersebut, terdapat aspek kemanusiaan yang sangat kelam, yakni peran BGF dalam manajemen tenaga kerja paksa. Ribuan pekerja dari berbagai negara diselundupkan melalui jalur ilegal di perbatasan Thailand-Myanmar untuk dipekerjakan sebagai operator penipuan siber. Fenomena ini mengonfirmasi pola perdagangan manusia di kawasan Mekong yang semakin kompleks, di mana kerentanan wilayah perbatasan dieksplorasi oleh sindikat dengan jejaring logistik kuat (Molasy & Ariyanti, 2022). Dalam kasus Yatai, BGF mengadopsi pola serupa namun dengan skala industri, menjadikan manusia sebagai komoditas utama dalam rantai pasok kejahatan ini. Mereka tidak hanya membiarkan penyelundupan terjadi, tetapi juga menarik pajak dari setiap kepala yang diselundupkan masuk ke wilayah otoritas mereka.

Lebih jauh lagi, kontrol terhadap tenaga kerja ini dilakukan melalui mekanisme "perbudakan siber" yang sistematis dan brutal. Sarkar dan Shukla (2025) mendefinisikan kondisi ini sebagai *cyber slavery infrastructures*, sebuah sistem sosio-teknis yang dirancang untuk memaksa kriminalitas melalui kurungan fisik dan pengawasan digital. Di dalam kompleks Yatai, para pekerja dikurung dalam gedung berpagar tinggi, paspor mereka ditahan, dan mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan fisik jika tidak mencapai target penipuan. BGF berperan sebagai enforcer atau penjaga penjara yang memastikan tidak ada tenaga kerja yang dapat melarikan diri dari kompleks tersebut. Infrastruktur fisik yang dibangun bukan untuk kenyamanan hunian, melainkan untuk efisiensi kontrol total terhadap ribuan budak digital tersebut.

---

Selain aspek fisik, sifat kejahatan yang berbasis digital di Yatai semakin memperumit upaya penegakan hukum lintas negara. Molasy (2024) dalam studinya mengenai digital frontier di Indonesia mencatat bahwa politik dan kebijakan negara sering kali tertinggal dalam merespons evolusi kejahatan siber yang melintasi batas yurisdiksi. Ketertinggalan regulasi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan secara maksimal oleh sindikat kriminal untuk beroperasi tanpa hambatan berarti di Myanmar. Rezim junta militer yang sibuk mempertahankan kekuasaan tidak memiliki kapasitas maupun kemauan politik untuk mengatur ruang siber di wilayah perbatasan. Akibatnya, Yatai New City menjadi surga digital (*digital haven*) bagi pelaku kejahatan yang ingin menghindari jerat hukum internasional.

Motif ekonomi menjadi pendorong utama mengapa ekosistem ini sangat sulit diberantas, mengingat besarnya aliran dana yang dihasilkan. Zan dan Kyaw Min (2025) mengungkapkan bahwa kejahatan siber telah menjadi sumber utama aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) di Myanmar, yang nilainya mencapai miliaran dolar AS per tahun. Dana hasil penipuan ini tidak hanya memperkaya sindikat asing, tetapi juga menjadi sumber pendapatan alternatif bagi aktor-aktor bersenjata di tengah sanksi ekonomi global. Shelley (2018) dalam analisisnya mengenai *dark commerce* menjelaskan bahwa ekonomi ilegal baru ini mampu mengancam masa depan negara dengan menciptakan ketergantungan finansial pada aktivitas kriminal. Di Myanmar, ketergantungan ini terlihat jelas dari bagaimana BGF dan faksi militer menggunakan uang dari Yatai untuk membiayai operasi militer mereka.

Simbiosis ini semakin diperkuat oleh kegagalan instrumen hukum dalam menembus tembok kekebalan yang dibangun oleh militer. Molasy (2025) menyoroti bahwa meskipun instrumen hukum internasional telah diadopsi di kawasan ASEAN, efektivitasnya sering kali lumpuh ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi politik elit lokal. Di Yatai, hukum negara sepenuhnya disubordinasi oleh kepentingan ekonomi bayangan, di mana aparat penegak hukum justru menjadi penerima manfaat dari kejahatan tersebut. Ketiadaan *rule of law* ini bukan karena ketidakmampuan negara, melainkan karena pembiaran yang disengaja demi keuntungan finansial. Hal ini menjadikan segala bentuk diplomasi atau tekanan hukum internasional menjadi tumpul di hadapan realitas lapangan.

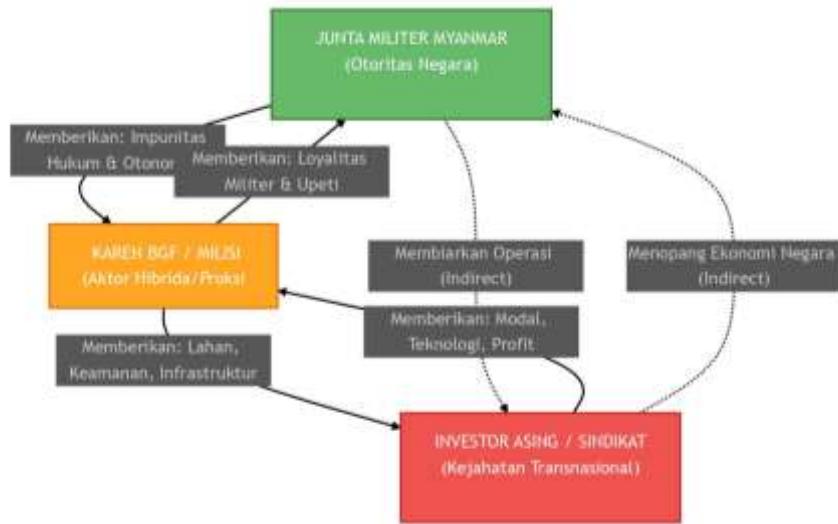
Model relasi antara Junta dan BGF ini juga menawarkan perspektif kontras terhadap penanganan konflik separatis di negara tetangga. Molasy dan Elfadani (2025) menganalisis bahwa di Thailand Selatan, otonomi khusus digunakan sebagai instrumen untuk meredam separatisme dan membangun perdamaian melalui jalur legal. Sebaliknya, di Myanmar, Junta memberikan semacam "otonomi kriminal" kepada BGF sebagai strategi kooptasi militer tanpa mempedulikan dampak sosialnya. BGF diizinkan mengelola wilayahnya sendiri dan menjalankan bisnis ilegal asalkan tetap loyal kepada Junta dalam melawan kelompok pro-demokrasi. Strategi ini efektif meredam perlawanan BGF terhadap pusat, namun dengan biaya terciptanya negara kriminal di perbatasan.

Kondisi ini menegaskan bahwa Yatai New City bukan sekadar masalah kriminalitas biasa, melainkan manifestasi dari State-Crime Nexus yang parah. Kolaborasi strategis antara aktor negara (Junta), aktor hibrida (BGF), dan jaringan kriminal transnasional telah menciptakan struktur kekuasaan yang kebal hukum. Keberlanjutan operasi scam di Yatai adalah hasil langsung dari kebutuhan Junta akan dana dan kebutuhan BGF akan wilayah kekuasaan. Tanpa memutus rantai aliran keuangan dan dukungan politik ini, penegakan hukum parsial tidak akan berhasil.

Ekosistem kriminal di Yatai New City merepresentasikan adaptasi berbahaya dari kekuasaan otoriter dalam menghadapi tekanan global. Kriminalitas tidak lagi menjadi musuh negara, melainkan mitra strategis dalam mempertahankan rezim yang sedang goyah. Implikasinya, intervensi internasional tidak bisa lagi hanya memandang ini sebagai isu penegakan hukum kepolisian semata. Diperlukan pendekatan ekonomi politik yang komprehensif untuk menargetkan aliansi yang menopang operasi tersebut, mulai dari sanksi finansial yang lebih ketat hingga tekanan diplomatik pada aktor-aktor negara yang terlibat.

#### **Simbiosis Mutualisme di Bawah Tekanan Sanksi: Politik Impunitas dan Kegagalan Instrumen Hukum**

Keberadaan Yatai New City di wilayah perbatasan Myanmar tidak dapat dipisahkan dari restu politik yang diberikan secara diam-diam namun efektif oleh Junta Militer Myanmar (Tatmadaw). Analisis mendalam menggunakan kerangka State-Crime Nexus memperlihatkan bahwa hubungan antara Junta dan Border Guard Forces (BGF) bukan sekadar aliansi militer taktis, melainkan bentuk simbiosis mutualisme yang didorong oleh kebutuhan bertahan hidup (*survival*). Pasca-kudeta 2021, posisi Junta yang semakin terisolasi akibat sanksi ekonomi dari negara-negara Barat memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan alternatif di luar jalur formal. Dalam konteks ini, ekonomi bayangan yang dijalankan di Shwe Kokko menjadi katup penyelamat bagi likuiditas finansial rezim militer tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Andreas (2013), dalam situasi negara yang tertekan, batas antara otoritas negara dan perusahaan kriminal sering kali menjadi kabur demi kelangsungan hidup politik penguasa. Junta secara sadar membiarkan operasi ilegal ini berkembang karena mereka membutuhkan aliran dana segar yang tidak dapat dilacak oleh sistem perbankan internasional.



Gambar 2. Relasi antara junta militer Myanmar, Karen Border Guard Forces (BGF), dan investor asing

Bagan tersebut menggambarkan pemetaan alur pertukaran kepentingan antara Junta Militer Myanmar, Border Guard Forces (BGF), dan investor asing yang terlibat dalam kejahatan transnasional. Skema hubungan ini menunjukkan bahwa Junta berperan sebagai otoritas negara yang memberikan impunitas hukum dan otonomi operasional kepada BGF sebagai imbalan atas loyalitas militer dan setoran ekonomi. BGF, sebagai aktor hibrida sekaligus proksi negara, kemudian menyediakan kontrol teritorial, keamanan bersenjata, serta infrastruktur bagi investor asing atau sindikat kriminal. Sebaliknya, investor kriminal memasok modal, teknologi, dan aliran keuntungan finansial yang menopang operasi BGF sekaligus secara tidak langsung menopang ekonomi politik rezim Junta. Pola ini memperlihatkan bahwa pemberian negara terhadap operasi ilegal bukanlah kelalaian, melainkan bagian dari mekanisme pertukaran yang terstruktur, di mana negara, milisi, dan kriminal terhubung dalam satu rantai produksi dan distribusi keuntungan ilegal. Dengan demikian, Yatai New City berfungsi sebagai simpul ekonomi-politik dimana kekuasaan negara direproduksi melalui kriminalitas, bukan melalui tata kelola hukum formal.

Tekanan sanksi internasional telah menciptakan ketergantungan finansial yang akut antara pusat kekuasaan di Naypyidaw dengan aktor-aktor di periferi yang menguasai sumber daya ekonomi ilegal. Zan dan Kyaw Min (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa kejahatan siber dan perjudian online kini telah menjadi kontributor utama bagi aliran keuangan ilegal (*illicit financial flows*) di Myanmar. Dana yang dihasilkan dari operasi di Yatai New City mengalir tidak hanya ke kantong investor asing, tetapi juga dikonversi menjadi dukungan logistik bagi militer. Junta Militer memahami bahwa tanpa dukungan finansial dari BGF, kemampuan mereka untuk membiayai operasi militer melawan kelompok pro-demokrasi akan terganggu secara signifikan. Oleh karena itu,

---

hubungan ini didasarkan pada pragmatisme ekonomi politik yang mengenyampingkan moralitas hukum negara. Negara tidak lagi berfungsi sebagai regulator, melainkan sebagai rent-seeker yang memungut keuntungan dari aktivitas kriminal di wilayahnya sendiri.

Sebagai imbalan atas setoran upeti dan loyalitas yang diberikan oleh BGF, Junta Militer memberikan lisensi impunitas yang memungkinkan bisnis ilegal tersebut beroperasi tanpa gangguan hukum. Impunitas ini bukan sekadar pembiaran pasif, melainkan sebuah jaminan keamanan aktif yang diberikan oleh institusi negara kepada aktor non-negara. Snyder (2006) berargumen bahwa kelompok bersenjata di negara yang diperebutkan sering kali mengubah kemampuan kekerasan mereka menjadi tatanan politik yang menghasilkan pendapatan. Dalam kasus BGF, kemampuan mereka untuk mengendalikan wilayah perbatasan dikonversi menjadi modal negosiasi dengan Junta untuk mendapatkan otonomi penuh. Hal ini menciptakan zona eksklusif di mana hukum nasional Myanmar tidak berlaku, digantikan oleh aturan main yang ditetapkan oleh sindikat kriminal. BGF menikmati hak istimewa untuk tidak disentuh oleh aparat penegak hukum selama mereka tetap setia kepada agenda politik Junta.

Fenomena ini juga mencerminkan transformasi struktur ekonomi politik Myanmar menjadi apa yang disebut oleh Shelley (2018) sebagai *dark commerce* atau perdagangan gelap yang terinstitusionalisasi. Shelley memperingatkan bahwa ketika ekonomi ilegal baru tumbuh membesar, ia akan mengancam masa depan negara dengan merusak integritas institusi publik dari dalam. Di Myanmar, institusi militer dan kepolisian telah terkooptasi sepenuhnya oleh kepentingan bisnis haram ini, sehingga fungsi penegakan hukum menjadi lumpuh total. Para jenderal militer lebih memilih untuk berkolaborasi dengan bos mafia daripada menegakkan kedaulatan hukum, karena insentif ekonomi yang ditawarkan jauh lebih besar. Akibatnya, Yatai New City tumbuh menjadi entitas yang kebal hukum, dilindungi oleh mereka yang seharusnya memberantasnya. Struktur impunitas ini begitu kokoh karena dibangun di atas fondasi saling ketergantungan yang eksistensial bagi kedua belah pihak.

Kondisi tersebut membawa kita pada paradoks pembangunan dan penegakan hukum yang terjadi di kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Meskipun berbagai kerangka hukum internasional telah tersedia, implementasinya di tingkat nasional sering kali mengalami kegagalan yang sistemik. Molasy (2025) menyoroti bahwa meskipun instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo telah diadopsi oleh negara-negara di kawasan seperti Thailand, efektivitasnya sering kali lumpuh ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi politik elit lokal. Studi Molasy tersebut memberikan konteks penting bahwa masalah utamanya bukan terletak pada ketiadaan hukum (*legal void*), melainkan pada lemahnya political will akibat intervensi kepentingan elite. Di Thailand,

---

penegakan hukum terhadap perdagangan manusia sering terhambat oleh korupsi, namun di Myanmar situasinya jauh lebih ekstrem karena negara itu sendiri yang menjadi pelindung kejahatan.

Di Yatai New City, hukum negara sepenuhnya disubordinasi oleh kepentingan ekonomi bayangan yang dikendalikan oleh oligarki militer. Instrumen hukum menjadi tidak relevan karena aktor penegak hukum, dalam hal ini militer, justru menjadi penerima manfaat utama dari kejahatan tersebut. Laporan dari United States Institute of Peace (2024) mengonfirmasi bahwa kejahatan transnasional di Asia Tenggara kini berkembang menjadi ancaman keamanan global karena adanya keterlibatan aparat negara. Ketika regulator berubah menjadi fasilitator, maka segala bentuk mekanisme hukum menjadi mandul dan hanya bersifat seremonial belaka. Hukum hanya digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik, bukan untuk menindak mitra bisnis kriminal yang menguntungkan rezim. Inilah yang menyebabkan mengapa operasi scamming di perbatasan Myanmar dapat terus beroperasi secara terbuka meskipun dunia internasional mengacamnya.

Kegagalan instrumen hukum ini diperparah oleh fakta bahwa Myanmar menempati peringkat tertinggi dalam indeks kriminalitas global. Global Initiative against Transnational Organized Crime (2023) menempatkan Myanmar sebagai salah satu episentrum kejahatan terorganisir dunia, didorong oleh konflik dan runtuhnya supremasi hukum. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa aktor negara di Myanmar adalah pelaku utama yang memfasilitasi perdagangan manusia dan kejahatan siber. Hal ini sejalan dengan argumen Molasy (2025) bahwa tanpa reformasi struktural pada institusi penegak hukum, adopsi perjanjian internasional hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Di Yatai, "hukum" yang berlaku adalah hukum pasar gelap, di mana segala sesuatu, termasuk kebebasan manusia dan kedaulatan wilayah, dapat diperjualbelikan.

Lebih jauh lagi, model relasi Junta-BGF ini menawarkan perspektif kontras yang menarik jika dibandingkan dengan penanganan konflik separatis di negara tetangga. Biasanya, negara berupaya meredam separatisme melalui pemberian otonomi khusus atau desentralisasi fiskal untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini dianalisis secara mendalam dalam konteks Thailand Selatan oleh Molasy dan Elfadani (2025), di mana otonomi khusus ditawarkan sebagai solusi legal untuk mengakomodasi identitas lokal dan mereduksi kekerasan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah konflik kembali ke dalam kerangka hukum negara melalui kompromi politik yang bermartabat. Namun, apa yang terjadi di perbatasan Myanmar adalah kebalikan total dari prinsip-prinsip otonomi daerah yang demokratis tersebut.

Di Myanmar, Junta Militer tidak menawarkan otonomi demokratis atau desentralisasi fiskal yang transparan kepada etnis Karen di Shwe Kokko. Sebaliknya, mereka memberikan apa yang dapat disebut sebagai otonomi kriminal kepada BGF sebagai strategi kooptasi militer. BGF diizinkan mengelola wilayahnya sendiri secara mutlak dan menjalankan bisnis ilegal apapun asalkan tidak menyerang posisi militer Junta. Strategi ini efektif meredam potensi separatisme BGF dalam jangka

pendek, namun dengan biaya sosial jangka panjang yang sangat tinggi. Perbedaan mendasar dengan studi Molasy dan Elfadani (2025) adalah bahwa di Myanmar, perdamaian dibeli dengan mengorbankan supremasi hukum, bukan dengan menegakkannya.

Model otonomi kriminal ini menciptakan preseden berbahaya bagi tata kelola perbatasan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi garda depan kedaulatan negara, kini berubah menjadi inkubator bagi kejahatan transnasional yang canggih. United Nations Office on Drugs and Crime (2024) mencatat bahwa konvergensi antara penipuan siber dan inovasi teknologi di wilayah yang tidak terjamah hukum ini telah menciptakan lanskap ancaman yang terus bergeser. BGF memanfaatkan otonomi yang diberikan Junta untuk membangun infrastruktur kejahatan yang melintasi batas negara tanpa takut akan sanksi. Akibatnya, kedaulatan negara di wilayah ini telah terprivatisasi menjadi aset komersial bagi kelompok milisi.

Dampak dari strategi ini adalah terciptanya sebuah criminal state atau negara kriminal mini di dalam wilayah kedaulatan Myanmar. Yatai New City menjadi monumen kegagalan tata kelola perbatasan, di mana kedaulatan tidak ditegakkan melalui hukum positif, melainkan diperdagangkan demi keuntungan finansial. Kedaulatan negara telah direduksi menjadi komoditas yang dipertukarkan antara Junta yang membutuhkan stabilitas rezim dan BGF yang membutuhkan kekayaan. Stabilitas yang tercipta di wilayah tersebut adalah stabilitas semu yang dibangun di atas penderitaan korban perdagangan manusia dan penipuan global. Rezim Junta yang rapuh memilih untuk menggadaikan integritas teritorialnya demi kelangsungan kekuasaan mereka sendiri.

Simbiosis antara Junta dan BGF menunjukkan betapa dalamnya penetrasi kepentingan kriminal dalam struktur politik Myanmar pasca-kudeta. Kegagalan instrumen hukum di kawasan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan teknis, melainkan oleh desain politik yang disengaja. Analisis komparatif dengan studi Molasy (2025) dan Molasy & Elfadani (2025) memperjelas bahwa tanpa perubahan rezim atau tekanan eksternal yang masif terhadap rantai pasok keuangannya, "otonomi kriminal" ini akan terus bertahan. Yatai New City adalah bukti nyata bahwa ketika negara gagal menjalankan fungsinya, aktor hibrida akan mengambil alih dan menciptakan tatanan baru yang merugikan keamanan global.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Yatai New City bukanlah sekadar anomali di wilayah tanpa hukum (ungoverned space), melainkan manifestasi struktural dari State-Crime Nexus yang terlembaga di Myanmar. Temuan studi menegaskan bahwa ekosistem kejahatan siber di perbatasan ini terbentuk melalui simbiosis mutualisme yang kalkulatif antara ambisi ekonomi Karen Border Guard Forces (BGF) dan kebutuhan bertahan hidup (survival) Junta Militer di tengah isolasi

---

global. Dalam konfigurasi ini, BGF tidak hanya bertindak sebagai milisi etnis, tetapi telah berevolusi menjadi aktor hibrida yang menyediakan infrastruktur teknis dan keamanan bagi sindikat transnasional.

Transformasi ini menciptakan paradoks tata kelola: di satu sisi negara hadir secara represif melalui kekuatan militer, namun di sisi lain negara absen secara fungsional dalam penegakan hukum. Pemberian "otonomi kriminal" kepada BGF, yang sangat kontras dengan konsep otonomi daerah untuk perdamaian, membuktikan bahwa kedaulatan negara telah diperlakukan menjadi komoditas ekonomi. Akibatnya, ribuan korban perdagangan manusia terjebak dalam sistem perbudakan siber yang dilindungi oleh dinding kekebalan politik yang kokoh.

Implikasi teoritis dan praktis dari studi ini sangat jelas: pendekatan keamanan tradisional yang mengandalkan kerjasama police-to-police tidak akan efektif membongkar jaringan ini, karena aktor negara yang seharusnya menjadi mitra penegak hukum justru berfungsi sebagai pelindung utama kejahatan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan global harus bergeser ke arah tekanan ekonomi politik yang komprehensif, menargetkan aliran keuangan gelap yang menopang rezim, serta memutus rantai pasok teknologi yang memungkinkan operasi scam ini terus berkembang. Tanpa intervensi struktural tersebut, Yatai New City akan terus menjadi preseden berbahaya bagi masa depan keamanan manusia di Asia Tenggara.

## DAFTAR REFERNSI

- Andreas, P. (2013). *Smuggler nation: How illicit trade made America*. Oxford University Press, USA.
- Burgess, M. (2025, February 27). *Elon Musk's Starlink Is Keeping Modern Slavery Compounds Online*. WIRED. Retrieved December 15, 2025, from <https://www.wired.com/story/starlink-scam-compounds/>
- Denzin, N. K. (2009). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Aldine Transaction.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.
- Faisal Tareque Shohan, Abu Ubaida Akash, Muhammad Ibrahim & Mohammad Shafiu Alam. (2022). *Crime Prediction Using Machine Learning with a Novel Crime Dataset*. (Preprint) ([arXiv](#))
- Gamboa, F. P. (2025, Agustus 1). Observations on the State of Cybersecurity in Southeast Asia. *EAST-WEST CENTER OCCASIONAL PAPER*, 16, 1-22. <https://www.jstor.org/stable/resrep71805>
- Gargi Sarkar & Sandeep Kumar Shukla. (2025). *Cyber Slavery Infrastructures: A Socio-Technical Study*

*of Forced Criminality in Transnational Cybercrime.* (Preprint) ([arXiv](#))

Global Initiative against Transnational Organized Crime. (2023). Global Organized Crime Index 2023. Global Initiative.

Molasy, H. D. (2024). The Digital Frontier: How Indonesia's Politics is Shaping the Fight against Human Trafficking. JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 5(2), 118-131.

H. Waxenecker, J. R. Nicolás-Carlock & I. Luna-Pla. (2025). *Prosecution of Complex Criminal Networks: A Multilevel ERGMs Approach to CICIG's Judicial Cases.* (Preprint) ([arXiv](#))

M. M. Alam & H. Uddin. (2025). *Navigating Challenges of Bangladesh–Myanmar Border Management and Its Strategic Solutions.* Society & Sustainability, 7(1), 32–43. ([riopenjournals.com](#))

Maria Bada & Jason R. C. Nurse. (2021). *Profiling the Cybercriminal: A Systematic Review of Research.* (Preprint) ([arXiv](#))

Md. Harun-Or-Rashid, Akkas Ahamed & Md. Sayedur Rahman. (2020). *A Critical Study on the Transnational Organized Crime Along the Bangladesh–Myanmar Border.* International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 52(2), 203–216. ([GSSRR](#))

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* SAGE Publications.

Moe Thuzar & Kyi Sin. (2024). *The Extraordinary Rise of Cybercrime Operations in Myanmar.* (Case study / working paper) ([ScholarBank](#))

Molasy, H. D. (2025). Instrumen Hukum dalam Mendorong Pembangunan Internasional: Studi Kasus Penanggulangan Perdagangan Manusia di Thailand. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 4(2), 257-271.

Molasy, H. D., & Ariyanti, S. F. (2022). Perdagangan Anak di Thailand. Indonesia Emas Group.

Molasy, H. D., & Elfadani, E. (2025). Otonomi Khusus di Thailand Selatan: Meredam Separatisme, Membangun Perdamaian. Books For A Better World.

Pinzón, V. G., & Mantilla, J. (2020, November 12). Contested borders: organized crime, governance, and bordering practices in Colombia-Venezuela borderlands. *Trends in Organized Crime*, 24(2), 265–281. 10.1007/s12117-020-09399-3

S. M. Zobaer Alam. (2024). *The Impact of Integrated Border Security System on Human Trafficking in Bangladesh: The Mediating Effect of the Use of Advanced Technology.* IJISRT, 9(7). ([IJISRT](#))

Shelley, L. I. (2018). Dark Commerce: How a New Illicit Economy Is Threatening Our Future. Princeton University Press.

Snyder, R. (2006). Does Lootable Wealth Breed Disorder? A Political Economy of Extraction

---

Framework. Comparative Political Studies, 39(8), 943–968.

*The Organized Crime Index.* (n.d.). The Organized Crime Index. Retrieved December 15, 2025, from <https://ocindex.net/country/myanmar>

United Nations Office on Drugs and Crime – Regional Office for Southeast Asia and the Pacific. (2024). *Transnational Organized Crime and the Convergence of Cyber-Enabled Fraud, Underground Banking, and Technological Innovation: A Shifting Threat Landscape.* ([UNODC](#))

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). Conflict and Organized Crime in Southeast Asia. UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific.

United States Institute of Peace. (2022, November). *Myanmar's criminal zones: A growing threat to global security.* United States Institute of Peace

United States Institute of Peace (USIP). (2024). Transnational Crime in Southeast Asia: A Growing Threat to Global Peace and Security. USIP Special Report.

Wired. (2025). Inside the Scam Compounds: How Technology Fuels Human Trafficking in Myanmar. Wired Magazine.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). Sage Publications.

Zan, T. T., & Kyaw Min, S. T. (2025). *Cybercrimes and the Illicit Financial Flows in Myanmar.* Journal of Academics Stand Against Poverty, 6(1), 43–69. ([jurnalasap.org](http://jurnalasap.org))